

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

**BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**



**RENCANA KERJA
BKPSDM KAB. BONE**

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

Bab I.	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	3
1.3.	Maksud dan Tujuan	5
1.4.	Sistematika Penulisan	6
Bab II.	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU	7
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.3.	Kepegawaian Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	22
2.4.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	24
Bab III.	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	25
3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	25
3.3.	Program dan Kegiatan	33
Bab V.	PENUTUP	36
	Lampiran	

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Bone Tahun 2018 ini merupakan langkah awal dan pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone dalam melaksanakan kegiatan dan memudahkan dalam pengukuran kinerja selama 1 (satu) tahun yang merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia yang dimiliki dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini segala masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan, agar penyusunan Rencana Kerja ini dapat dilakukan dengan baik dan secara optimal mampu menjawab berbagai tantangan kedepan terutama dalam meningkatkan pemberdayaan aparatur dan dalam memberikan pelayanan secara proporsional dan professional kepada segenap aparatur Pemerintah Kabupaten Bone.

Watampone, 20 Maret 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BONE




Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19701020 199603 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dimana setiap masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) setiap tahun.

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan , tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahapan penyiapan penyusunan, tahapan penyusunan rancangan dan tahapan penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen renja SKPD yang defenitif.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA SKPD) berpedoman pada RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone yang telah dituangkan dalam RKPD. dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan RENJA-SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal RKPD.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone berkewajiban menyusun RENJA-SKPD tahun anggaran 2017 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bone khususnya bidang kepegawaian untuk dijadikan pedoman dalam mengukur tingkat kinerja bagi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone Tahun 2018 merupakan Dokumen Perencanaan yang

berisi tentang rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurung waktu tertentu. Rencana kerja (RENJA) tahun 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone yang mengacu pada Rencana Strategis (RENTRA)

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasilnya.

Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone Tahun 2018 ini dimaksudkan mempermudah/memperlancar dalam melakukan monitoring evaluasi dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Rencana Kerja adalah Dokumen Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan anggaran. Rencana

Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bone adalah untuk menentukan prioritas program kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan hasil program kegiatan periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone Tahun 2018 adalah :

- a. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1993 tentang Undang – Undang Pokok Kepegawaian.
- b. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
- d. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
- e. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
- f. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410;
- g. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;

- h. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
- i. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
- j. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009;
- o. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- p. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang penyalarsan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014;

- q. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- r. Keputusan Bupati Bone Nomor 67 Tahun 2008 tentang Rencian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub, Bagian dan Sub. Bidang pada BKDD Kab. Bone.
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- t. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- u. Peraturan Bupati Bone Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bone.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bone Tahun 2018 ini adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efesiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menyediakan dokumen tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bone
- b. Sebagai pedoman pengendali pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bone

- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bone pada tahun anggaran 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bone disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Restra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Penyelenggaraan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV. PENUTUP

Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi tuntutan di era reformasi yang sarat dengan persaingan dan perubahan dalam tatanan pemerintahan. Kenyataan ini menuntut adanya profesionalisme Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan jalannya pemerintahan.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bone tahun anggaran 2016 berupaya meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam rangka mewujudkan sasaran dan tuntutan reformasi birokrasi melalui penataan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (Inventarisasi PNS), penataan penempatan PNS, pengangkatan dalam jabatan Struktural maupun jabatan fungsional, dan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi Aparatur Sipil Negara dan pejabat struktural lingkup Pemerintah Kab. Bone maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bone telah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV dengan bekerja sama dengan Badan Diklat Provinsi Sulawesi-Selatan.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bone tahun 2016 telah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II yang diikuti oleh 10 pejabat struktural eselon II, 5 pejabat struktural eselon III dan 66 pejabat struktural eselon IV lingkup Pemerintah Kab. Bone

Data pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk II, III dan IV, yang dilaksanakan dari tahun 2013 – 2016 sebagai berikut :

DIKLAT PIM	Capaian setiap Tahun				JUMLAH
	2013	2014	2015	2016	
DIKLAT PIM Tk II	-	3 Org	6 Org	10 Org	19 Org
DIKLAT PIM Tk. III	-	-	30 Org	5 Org	35 Org
DIKLAT PIM Tk. IV	-	-	60 Org	66 Org	126 Org

Berdasarkan data per Desember 2016 bahwa jumlah pejabat struktural eselon II yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM) Tk. II sebanyak 29 orang dari jumlah jabatan struktural eselon II sebanyak 39 jabatan, sedangkan yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM) Tk. II sebanyak, 9 orang, atau terealisasi 74,35% sedangkan pejabat struktural eselon III yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM) Tk. III sebanyak 159 orang dari jumlah jabatan struktural eselon III sebanyak 245 jabatan. Pejabat struktural eselon III yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM) Tk. III sebanyak 86 orang atau terealisasi 64,89%, sedangkan pejabat struktural eselon IV yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM) Tk. IV sebanyak 453 orang dari jumlah jabatan struktural eselon IV sebanyak 1036 jabatan, sedangkan pejabat struktural eselon IV yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan Kepemimpinan (Diklat PIM) Tk. IV sebanyak 583 orang atau terealisasi 43,73%.

Untuk mendukung peningkatan pelayanan kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Bone sebagai instansi yang berwenang mengelola kepegawaian dituntut pula untuk melakukan reformasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepegawaian dengan berbasis pada teknologi informasi.

Terkait dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Bone telah memanfaatkan penerapan teknologi informasi sebagai basis pelayanan kepegawaian dalam hal ini melalui Sistem

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dimana informasi pelayanan kepegawaian dapat diakses secara on line.

Pada tahun 2016 BKDD dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian telah melakukan peremajaan data pegawai lingkup Pemerintah Kab. Bone dan menghasilkan satu dokumen data pegawai dalam bentuk 'INKA DALAM ANGKA BKDD 2016, disamping itu SAPK dipergunakan dalam proses kenaikan pangkat PNS, proses pensiun dan penginputan data Calon Pegawai Negeri Sipil. Dan tahun anggaran 2016 BKDD Kab. Bone telah mengembangkan Website BKDD dengan nama www.bkdd.bonekab.go.id. Website ini bertujuan memberikan layanan informasi kepegawaian baik kepada masyarakat maupun kepada PNS itu sendiri.

Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana roda pemerintahan selain dituntut untuk profesional juga harus memiliki pengetahuan nilai-nilai agama sebagai tuntunan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kegiatan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bone yaitu Kegiatan Pembinaan Mental dan Spritual PNS. Kegiatan ini secara berkala dilaksanakan pada setiap instansi atau SKPD. Pada tahun 2016 kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 136 kali kegiatan di setiap instansi, SKPD, Sekolah SMA/SMP lingkup Pemerintah Kab. Bone. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai religius kepada PNS.

Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi berupa penganugrahan satya lencana karya satya diberikan kepada PNS yang telah berjasa dan atas pengabdianya kepada negara selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Pada anggaran 2016, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bone telah menyerahkan Satya Lencana Karya Satya kepada 257 PNS dengan rincian untuk satya lencana 10 tahun diberikan kepada PNS sebanyak 47 orang, satya lencana 20 tahun diberikan kepada PNS sebanyak 89 orang dan satya lencana 30 tahun diberikan kepada PNS sebanyak 47 orang.

Kegiatan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS lingkup pemerintah Kab Bone Tahun anggaran 2016, Badan Kepegawaian

pendidikan dan pelatihan menangani kasus berupa menerbitkan laporan kedisiplinan pegawai disetiap SKPD dilingkup Pemerintah Kab. Bone dan penanganan kasus perceraian PNS sebanyak 26 kasus.

Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Aparatur, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bone memberikan rekomendasi kepada PNS untuk penjenjangan pendidikan, baik jenjang pendidikan S3, S2, S1 maupun Diploma dan penjenjangan pendidikan profesi. Pada Tahun 2016 BKDD telah mengeluarkan rekomendasi Tugas Belajar jenjang pendidikan Strata Dua (S2) sebanyak 5 orang, sedangkan pemberian rekomendasi untuk Izin Belajar sebanyak 154 orang antara lain rekomendasi Izin Belajar kepada PNS yang melanjutkan Pendidikan ke jenjang pendidikan Strata Dua (S2) sebanyak 102 orang, rekomendasi izin belajar untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S1) sebanyak 47 orang dan rekomendasi izin belajar untuk jenjang Profesi Ners sebanyak 5 orang

Pada tahun anggaran 2016 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Bone mengusulkan kenaikan pangkat PNS sebanyak 2.594 berkas, Usul kenaikan pangkat pada periode April 2016, sebanyak 1.204 berkas dan pada usul kenaikan pangkat pada periode oktober 2016 sebanyak 1.390 berkas. Dan untuk pengusulan pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian PNS sebanyak 325 orang dengan rincian pensiun dengan Batas Usia Pensiun (BUP) sebanyak 257 orang, Pensiun Meninggal Dunia (MD) sebanyak 58 orang dan Pensiun dengan Permintaan Sendiri (PS) sebanyak 10 orang.

Untuk meningkatkan kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Bone dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendukung, pada tahun anggaran 2016 BKDD Kab. Bone telah memprogram belanja modal antara lain : Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor antara : 1 unit AC, 2 unit filling cabinet, 1 paket karpet, 1 unit proyektor dan 1 paket sound system. Belanja modal pengadaan Peralatan Kantor antara lain 7 unit printer dan 3 unit alat komunikasi, pengadaan mebeleur antara lain 1 paket meja dan 8 buah kursi rapat dan 1 unit almari .

Tabel 2.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pemerintah daerah	Jumlah Pejabat Eselon II yang mengikuti Diklat PIM Tk. II Jumlah Pejabat Eselon III yang mengikuti Diklat PIM Tk III Jumlah Pejabat Eselon IV yang mengikuti Diklat PIM Tk. IV Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Izin Belajar Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Sosialisasi	6 Org 30 Org 60 Org 2 Org 150 Org 400 Org	10 Org 5 Org 66 Org 5 Org 154 Org 400 Org	166,66% 16,66% 110,00% 250,00% 102,66% 100%
2.	Meningkatnya pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dan optimalnya sistem reward and punishment	Persentas kasus-kasus yang tertangani Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Jumlah PNS yang Naik Pangkat Jumlah PNS yang Pensiun Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah/Janji PNS Jumlah Pejabat yang melaporkan Harta Kekayaannya Jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan PNS	100% 250 Org 2000 Org 300 Org 1000 Org 116 Orang 350 Org	100% 257 Org 2416 Org 325 Org 1082 Org 327 Org 907 Org	100% 102,80% 120,80% 308,33% 108,20% 281,89% 259,14%
3.	Meningkatnya pemahaman spritual aparatur pemerintah daerah	Jumlah pelaksanaan bimbingan mental dan spiritual PNS di Instansi/SKPD	140 Kali	136 Kali	97,14%
4.	Tertatanya Penempatan Pegawai	Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai kualifikasi pendidikan dan jabatan, Penempatan Perpindahan PNS antar Wilayah dan Perpindahan antar Instansi/SKPD	1000 Org	2.500 Org	250%

5.	Meningkatnya sistem dan mekanisme pola pengembangan karier pegawai	Dokumen Laporan kinerja pegawai	1 Dokumen Laporan Data Kinerja Pegawai	1 Dokumen Laporan Data Kinerja Pegawai	100%
6.	Tersedianya data dan informasi pegawai yang akurat dan pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan Sistem Aplikasi Informasi Kepegawaian	Data Pegawai Lingkup Pemerintah Kab Bone 'Data Pegawai INKA DALAM ANGKA BKDD 2015'	1 Dokumen Data Pegawai	1 Dokumen Data Pegawai	100%
7.	Meningkatnya sistem dan mekanisme pola pengembangan karier pegawai	Dokumen Laporan kinerja pegawai	1 Dokumen Data Kinerja Pegawai	1 Dokumen Data Kinerja Pegawai	100%
8.	Tersedianya data dan informasi pegawai yang akurat dan pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan Sistem Aplikasi Informasi Kepegawaian	Data Pegawai Lingkup Pemerintah Kab Bone 'Data Pegawai INKA DALAM ANGKA BKDD 2016'	1 Dokumen Data PNS	1 Dokumen Data PNS	100%

10.	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan	1. Pengadaan Filling Cabinet	2 Unit	2 Unit	100%
		2. Pengadaan AC	1 Unit	1 Unit	100%
		3. Pengadaan Karpet	1 Paket	1 Paket	100%
		4. Pengadaan Printer	7 Unit	7 Unit	100%
		5. Pengadaan Proyektor	1 Unit	1 Unit	100%
		6. Pengadaan Alat Komunikasi	3 Unit	3 Unit	100%
		7. Pengadaan Sound Sistem	1 Paket	1 Paket	100%
		8. Pengadaan Meja	1 Paket	1 Paket	100%
		9. Pengadaan Kursi	8 Unit	8 Unit	100%
		10. Pengadaan Almari	1 Unit	1 Unit	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM pada Tahun 2016 melaksanakan 8 (delapan) Program yang dijabarkan ke dalam 35 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.237.244.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 4.061.635.215, atau 95,85 % dengan rincian pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 670.064.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.,- 669.997.020 atau (99,98%). Program ini didukung dengan kegiatan antara lain :

- 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dengan capaian kinerja terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran berupa ketersediaan jasa komunikasi (telepon/fax) selama 12 bulan sesuai rencana kebutuhan pelaksanaan program kegiatan.
- 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan** dengan capaian kinerja terelisasinya pembayaran honorarium PNS sebanyak 17 orang dan upah kerja pegawai honorer sebanyak 16 orang selama 12 Bulan
- 3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja** dengan capaian kinerja perbaikan peralatan kerja sebanyak 7 unit komputer, dan 5 unit AC
- 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor** dengan capaian kinerja tersedianya alat listrik dan elektronik selama 12 bulan

5. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan capaian kinerja tersediannya peralatan kebersihan dan bahan pembersih ruangan selama 12 bulan
 6. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan** dengan capaian kinerja tersedianya surat kabar dan majalah selama 12 bulan.
 7. **Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah** dengan capaian kinerja lancarnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi baik ke Provinsi maupun tingkat pusat
 8. **Pelaksanaan Administrasi Perkantoran** dengan capaian kinerja tersedianya Alat Tulis Kantor, Makanan dan Minuman Harian selama 12 bulan.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 360.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 357.064.019,- atau (99,07%). Program ini didukung dengan kegiatan antara lain :
1. **Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor :**
 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan antara lain :
 1. Belanja Modal Pengadaan AC 2 Unit
 2. Belanja Modal Pengadaan Filling Cabinet 1 unit
 3. Belanja Modal Pengadaan Karpet 1 Paket
 4. Belanja Modal Pengadaan Proyektor 1 Unit
 5. Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem 1 Paket
 2. **Pengadaan Peralatan Gedung Kantor**
 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor antara lain :
 1. Belanja Modal Pengadaan Printer 7 unit
 2. Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi 3 Unit
 3. **Pengadaan Mebeleur**
 Belanja Modal Pengadaan Mebeleur antara lain :
 1. Belanja Modal Pengadaan almari 1 unit
 2. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 8 unit
 3. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 paket

- 4. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor** dengan capaian kineja yaitu terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi Gedung Pertemuan BKDD.
- 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional** dengan capaian kinerja yaitu terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (mobil) sebanyak 2 unit dan kendaraan dinas roda 2 (motor) sebanyak 8 unit.
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 119.985.000,- atau (99,98%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung dengan kegiatan :
- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan capaian kineja yaitu terlaksananya Sosialisasi Implementasi Peraturan Penundang-Undangan bagi PNS Fungsional Guru dalam penerapan Penilaian Prestasi Kerja yang diikuti sebanyak 400 tenaga guru lingkup Pemerintah Daerah Kab. Bone
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.015.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.015.500,- atau (99,99%) dan realisasi fisik 100%. Program ini di dukung dengan kegiatan
- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian kinerja yaitu terlaksananya penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKDD.
- 5. Program Pengembangan Data /Informasi** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.015.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.015.500,- atau (99,99%) dan program ini di dukung dengan kegiatan :
- 1) Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan capaian kinerja yaitu terlaksananya penyusunan Dokumen Laporan Rencana Kerja BKDD

6. **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 84.290.000, atau(99,98%) dan Program ini didukung dengan kegiatan :

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi dengan capaian kinerja yaitu terlaksananya pengoperasian Website BKDD dalam mendukung informasi kepegawaian.

7. **Program Kedinasan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.270.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 23.500.000,- atau 77,63% dan program ini didukung dengan kegiatan :

- 1) Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme dengan capaian kinerja yaitu telah mengikutkan 4 orang PNS lingkup BKDD untuk mengikuti kursus-kursus singkat dan pelatihan.

8. **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.944.178.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.778.768.176, atau 94,38% dan program ini didukung dengan kegiatan :

1. **Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi** dengan capaian kinerja yaitu terlaksananya penganugrahan Satya Lencana Karya Satya kepada PNS yang telah berjasa dan atas pengabdianya kepada negara sebanyak 323 orang antara lain Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun sebanyak 148, Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun sebanyak 112 dan Satya Lencana Karya Satya 10 sebanyak 63 orang PNS lingkup Pemerintah Kab. Bone.
2. **Proses Penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS** dengan capaian kinerja terlaksananya penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS berupa menerbitkan laporan kedisiplinan pegawai disetiap SKPD dilingkup Pemerintah Kab. Bone dan penanganan kasus perceraian PNS sebanyak 26 kasus.
3. **Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN**

dengan capaian kinerja yaitu memberikan fasilitasi kepada pendaftar praja IPDN Kab. Bone ke BKD Provinsi Sulawesi Selatan.

4. **Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan** dengan capaian kinerja yaitu terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk II, yang diikuti sebanyak 10 pejabat struktural eselon II, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. III yang diikuti sebanyak 5 pejabat struktural eselon III dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV yang diikuti sebanyak 66 pejabat struktural eselon IV.
5. **Monitoring evaluasi dan Pelaporan** dengan capaian kinerja yaitu terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap 250 pejabat struktural lingkup Kab. Bone sebagai bahan laporan kepada pembina kepegawaian.
6. **Pembinaan Mental dan Spritual PNS** dengan capaian kinerja yaitu terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mental dan Spritual PNS sebanyak 136 kali, kegiatan dilaksanakan di setiap Dinas, Badan, Kantor, Kantor Camat, UPTD Pendidikan dan sekolah SMA/SMP. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai religius sebagai tuntunan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
7. **Pengelolaan Mutasi Kenaikan Pangkat PNS** dengan capaian kinerja terlaksananya pengusulan kenaikan pangkat PNS pada kenaikan pangkat periode April sebanyak 1204 orang dan pengusulan kenaikan pangkat periode Oktober sebanyak 1390 orang.
8. **Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai** dengan capaian kinerja terlaksananya pengusulan pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian PNS sebanyak 325 orang dengan rincian pensiun dengan Batas Usia Pensiun (BUP) sebanyak 257 orang, Pensiun Meninggal Dunia (MD) sebanyak 58 orang dan Pensiun dengan Permintaan Sendiri (PS) sebanyak 10 orang.
9. **Penempatan PNS** dengan capaian kinerja yaitu terlaksananya penempatan PNS sebanyak 2.500 orang, adapun jenis penempatan

antara lain penempatan mutasi jabatan, penempatan perpindahan PNS antar Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penempatan perpindahan PNS dalam lingkup Pemerintah Kab. Bone.

- 10. Pelayanan Kesejahteraan Material PNS** dengan capaian kinerja yaitu terlaksananya memberikan pelayanan kesejahteraan bagi PNS berupa penerbitan surat kenaikan gaji berkala untuk para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kab. Bone sebanyak 34 orang, penerbitan surat pencairan bantuan perumahan sebanyak 17 Orang, pengurusan kartu peserta taspen sebanyak 556 orang, Cuti dengan alasan penting sebanyak 200 orang dan pengurusan Ketaspenan (THT) sebanyak 100 orang.
- 11. Pengucapan Sumpah/Janji PNS** dengan capaian kinerja yaitu terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS sebanyak 1082 PNS lingkup Pemerintah Kab. Bone.
- 12. Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)** dengan capaian kinerja yaitu terlaksananya peremajaan data base PNS lingkup Kab, Bone yang tertuang dalam 1 dokumen berupa Buku INKA DALAM ANGKA BKDD tahun 2016 dan disamping itu aplikasi SAPK digunakan dalam proses kenaikan pangkat PNS.
- 13. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara** dengan capaian kinerja yaitu terlaksananya pengisian laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara lingkup Pemerintah Kab. Bone sebanyak 327 orang
- 14. Gerakan Nasional Revolusi Mental Bagi Aparatur Sipil Negara** dengan capaian kinerja yaitu terlaksananya pengadaan buku saku Aparatur Sipil Negara sebanyak 4.500 eksampilar.

3. Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	68.620.000	68.620.000	100%
4. Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	1.217.428.000	1.217.428.000	100%
5. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	151.200.000	149.774.169	99,06%
6. Pengelolaan Mutasi Kenaikan Pangkat PNS	224.400.000	224.400.000	100%
7. Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai	99.650.000	99.6650.000	100%
8. Penempatan PNS	130.180.000	129.190.000	99,24%
9. Pelayanan Kesejahteraan Material PNS	26.600.000	26.545.000	99,79%
10. Pengucapan Sumpah/janji PNS	64.200.000	64.057.000	99,34%
11. Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	113.000.000	108.769.133	96,26%
12. Pembinaan Mental dan Spritual PNS	223.400.000	221.600.000	99,19%
13. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Nrgara	80.100.000	80.079.000	99,97%
14. Gerakan Nasional Revolusi Mental Bagi Aparatur Sipil Negara	107.000.000	107.000.000	100%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bone adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan dibidang administrasi kepegawaian daerah. Pelayanan kepegawaian mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan era globalisasi. Dalam penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi masih dijumpai adanya permasalahan dan hambatan yang harus tetap diperhatikan untuk mengantisipasi dampak yang terjadi dalam mendukung visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone adalah:

- a. Adanya jumlah PNS yang pensiun namun tidak adanya penerimaan PNS sehingga akan mengurangi kegiatan pelayanan masyarakat;
- b. Masih adanya tenaga honor daerah/pegawai tidak tetap yang belum diangkat menjadi CPNS;
- c. Adanya kebijakan moratorium penerimaan CPNS Umum;
- d. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural dan fungsional tertentu;
- e. Pemetaan perbandingan jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional Tertentu sekaligus memfasilitasi dan sosialisasi tentang pentingnya Jabatan Fungsional Tertentu,

Permasalahan dan hambatan yang berdampak pada pencapaian program nasional adalah standar pelayanan minimal bidang kepegawaian yang harus diimbangi antara program pusat dan daerah dengan menyediakan sarana pendukung yang memadai. Tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone bahwa dengan semakin bertambahnya pegawai yang pensiun pada SKPD diharapkan tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan peluang untuk meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan sumberdaya aparatur terus dilakukan pembinaan dan

pengawasan agar PNS mampu memberikan kontribusi pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Formulasi isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti pada rencana kerja tahun kedepan adalah :

- a. Adanya kebijakan moratorium terbatas penerimaan CPNS Umum 5 tahun kedepan (2015 sampai 2020);
- b. Kelanjutan perpanjangan kontrak kerja Tenaga Honor Daerah/Pegawai Tidak Tetap;
- c. Tenaga Honorer K 2 yang belum lulus tes CPNS;
- d. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural dan fungsional tertentu;
- e. BKPSDM sebagai Lembaga Teknis Pembinaan Manajemen Kepegawaian di Daerah harus mulai memetakan perbandingan jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Fungsional Tertentu sekaligus memfasilitasi dan sosialisasi tentang pentingnya Jabatan Fungsional Tertentu, karena sesuai amanat Undang-undang ASN, salah satunya penataan jabatan bagi PNS, bahwa kedepan PNS ini akan lebih banyak diarahkan untuk menduduki jabatan fungsional tertentu agar lebih kaya fungsi sehingga Profesionalisme PNS akan terwujud;
- f. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang ASN;
- h. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang disampaikan kepada seluruh aparatur/PNS untuk mengurangi pelanggaran disiplin sehingga dapat meningkatkan pelayanan;
- i. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai yang disampaikan kepada seluruh aparatur/PNS agar aparatur memahami makna dari SKP
- j. Untuk peningkatan kesejahteraan PNS perlu adanya usaha Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Tunjangan uang makan (lauk-pauk) bagi PNS, karena sebagai perbandingan daerah lain telah ada yang mendapatkan tunjangan uang makan (lauk-pauk);
- k. Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki BUP
- l. Pemberian Reward bagi PNS yang berprestasi.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan pada musrenbang tahun anggaran 2017 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bone pada rencana kerja tahun 2018 tidak ada usulan dari masyarakat sehingga tidak dimasukkan dalam bentuk Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah. Dengan sasarannya semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sehingga pada prioritas pembangunan target kinerja adalah terwujudnya rasio jumlah PNS terhadap jumlah penduduk 1;30 terelisasi. Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan melalui penyusunan program dan rencana kerja dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi data kepegawaian yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi.
2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kepegawaian yang memadai.
3. Meningkatkan pelayanan kepada para pegawai secara profesional adil, transparan, akuntabel.
4. Melaksanakan rekrutmen dan penempatan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi.

10. Meningkatnya jumlah pegawai yang melanjutkan pendidikan melalui izin belajar dan tugas belajar.
11. Meningkatnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi.
12. Meningkatnya kinerja pegawai dalam pelayanan administrasi kepegawaian.
13. Meningkatnya jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat PIM.
14. Meningkatnya pembinaan dan menurunnya pemberian sanksi bagi PNS yang melanggar Peraturan Disiplin PNS.
15. Meningkatnya jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berdasarkan pola karier pegawai.
16. Terwujudnya standar kompetensi jabatan dan pedoman pola karir jabatan.

Tabel. 3.1
TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Meningkatnya Kapasitas Aparatur	- Persentase pejabat struktural yang sudah mengikuti Diklatpim Tk. II * - Persentase pejabat struktural yang sudah mengikuti Diklatpim Tk. III - Persentase pejabat struktural yang sudah mengikuti Diklatpim Tk. IV	90% 85% 70%
		Meningkatnya kapasitas pemahaman dan	Persentase pegawai yang Dikirim mengikuti diklat singkat	80%
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian serta akses informasi kepegawaian yang cepat dan akurat	Persentase pegawai yang sudah dientry data ke aplikasi SAPK	100%
			Persentase berkas kenaikan pangkat diproses akurat/tepat waktu	100%
			Persentase pemrosesan berkas usulan Pensiun tepat	100%
			Persentase pemrosesan berkas Karpeg, Taspen, Karsis atau Karsu	100%
3.	Terwujudnya penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Daerah serta menempatkan sumber daya aparatur sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi	Terlaksananya pengisian formasi atau pendistribusian pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi	Persentase Penempatan pegawai sesuai kebutuhan kaderisasi dan kualifikasi Pendidikan	85%
			Persentase calon Praja IPDN yang diterima	60%
4.	Meningkatkan pembinaan pegawai untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesejahteraan pegawai	Meningkatnya pemahaman PNS tentang hak dan kewajiban terhadap disiplin pegawai	Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur yang terangkum dalam suatu program untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone mempunyai strategi tersendiri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone secara keseluruhan.

Rencana strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu yang meliputi penetapan kebijakan, program, dan kegiatan operasional.

Strategi atau cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditentukan dan yang menjadi prioritas untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Strategi Pencapaian Sasaran

Sasaran Strategi 1 : Meningkatnya kapasitas aparatur		
Cara mencapai tujuan dan sasaran		
Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, memberikan bantuan tugas belajar, ikatan dinas, dan ijin belajar	1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS
	2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 2. Diklat Kepemimpinan Tk. II, II, dan IV Pemkab Bone
Sasaran Strategi 2 : Meningkatnya kapasitas pemahaman dan keterampilan pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi		
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan singkat, bimbingan teknis, kursus- kursus dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS	1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2. Pendidikan Penjurangan Struktural
	2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Sasaran Strategi 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian serta akses informasi kepegawaian yang cepat dan akurat		
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
Kebijakan	Program	Kegiatan
Peningkatan mutu pelayanan kepegawaian demi kepuasan aparatur pemerintah	1. Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Pengembangan sistem administrasi kepegawaian Kabupaten Bone
	2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Upgrade isi Website Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bone
	3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1. Pengurusan Kenaikan Pangkat PNS 2. Pengelolaan Pensiun PNS 3. Pengurusan Karpeg, Taspen, Karis atau Karsu 3. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS
Sasaran Strategi 4 : Meningkatnya pemahaman PNS tentang hak dan kewajiban terhadap disiplin pegawai		
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepegawaian
Sasaran Strategi 5 : Terlaksananya pengisian formasi atau pendistribusian pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi		
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
Penempatan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun sesuai dengan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. Pelantikan bagi Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab. Bone 2. Penempatan PNS 3. Assesment Center bag Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Bone

Tabel 3.3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. BONE
TAHUN 2018

Program	Kegiatan
layanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Gedung Kantor 4. Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Gedung Kantor 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Perlengkapan Kantor 2. Pengadaan Peralatan Kantor 3. Pengadaan Mobeleur 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pendidikan Kedinasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme PNS 2. Pendidikan Penjurusan Struktural

				Kantor	Lisuk/raian/angin/... Rencana Kebutuhan selama satu tahun anggaran						
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis terbitan surat kabar dan majalah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	15 Media Massa	21,500,000	APBD KAB.	15 Media Massa	23,500,000

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2. Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6. Pengembangan Data / Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Pengembangan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan 2. Pengelolaan Tata Naskah Pegawai
7. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
8. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi 2. Proses penanganan kasus – kasus pelanggaran disiplin PNS. 3. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan Dinas. 4. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan pra IPDN. 5. Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Tk. II 6. Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Tk. III 7. Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Tk. IV 8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

	<p>9. Pembinaan Mental dan Spiritual PNS.</p> <p>10. Pengelolaan Mutasi Kenaikan Pangkat PNS</p> <p>11. Pengelolaan Pensiun dan kenaikan Pangkat Pengabdian PNS</p> <p>12. Pengelolaan Pemutakhiran Data Pegawai</p> <p>13. Penempatan PNS</p> <p>14. Pengambilan Sumpah/Janji PNS</p> <p>15. Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)</p> <p>16. Pelayanan Kesejahteraan PNS</p> <p>17. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara</p> <p>18. Penyelesaian Administrasi Kedudukan Hukum PNS</p> <p>19. Penilaian Evaluasi Kinerja PNS</p> <p>20. Pengelolaan Sistem Absensi PNS</p> <p>21. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS</p>
--	--

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone merupakan implementasi dari Rencana Strategis (RESTRAT) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone yang disusun dan ditetapkan untuk memfokuskan kinerja dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun akan dievaluasi sebagai dasar sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun berikutnya, sehingga hasil pencapaian dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tiap tahunnya.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone tahun 2018 ini dilaksanakan oleh segenap jajaran di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone. Pelaksanaan dilakukan secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone untuk mampu meningkatkan kinerja dari proses yang merupakan output pengembangan kepegawaian setiap tahunnya.

Watampone, 20 Maret 2017

Kepala BKPSDM Kab. Bone



Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN

Pangkat : Pembina Utam Muda

NIP : 19701020 199603 1 004

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BONE TAHUN 2018**

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BONE

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20			Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan dan Persandian								
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama BKPSDM Kab. Bone selama satu Tahun Anggaran sesuai dengan Perencanaan	Kecamatan Tanete Riattang Barat (BKPSDM Kab. Bone)	100% (1 Tahun)	657,500,000	APBD KAB.	-	100%	672,500,000
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Ketersediaan jasa komunikasi (telepon/fax dan internet) sesuai rencana kebutuhan selama satu tahun anggaran	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100 % (1 Tahun)	13,500,000	APBD KAB.	-	100 % (1 Tahun)	14,650,000
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya tenaga pengelola keuangan antara lain PPTK, satuan PPK, Satuan Bendahara, Pengurus Barang dan Tenaga Sukarela	Kecamatan Tanete Riattang Barat	32 Orang	118,750,000	APBD KAB.	-	32 Orang	120,000,000
1	20	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tingkat ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100 % (1 Tahun)	5,250,000	APBD KAB.	-	100 % (1 Tahun)	7,350,000
1	20	01	13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai Rencana Kebutuhan selama satu tahun anggaran	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100 % (1 Tahun)		APBD KAB.	-	100 % (1 Tahun)	5,000,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis terbitan surat kabar dan majalah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	15 Media Massa	21,500,000	APBD KAB.	-	15 Media Massa	23,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 20 01 23	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Tingkat Ketersediaan laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100 % (1 Tahun)	225,000,000	APBD KAB.	-	100 % (1 Tahun)	227,000,000
1 20 01 24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetakan & Penggandaan, serta Makanan & Minuman sesuai Rencana Kebutuhan selama satu tahun anggaran	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100 % (1 Tahun)	273,500,000	APBD KAB.		100 % (1 Tahun)	275,000,000
1 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan mutu dan kelengkapan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur pada tahun anggaran berjalan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	170,700,000	APBD KAB.	-	100%	171,000,000
1 20 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan tahun anggaran berjalan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	- 2 Unit Ac Split - 8 Filling Cabinet	18,500,000	APBD KAB.	-	- 3 Unit Ac Split - 8 Filling Cabinet	25,000,000
1 20 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan tahun anggaran berjalan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	- 5 Unit Komputer (PC) - 3 Unit Printer	42,000,000	APBD KAB.	-	- 2 Unit Laptop - 2 Unit Printer	32,000,000
1 20 02 10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan meubeleur sesuai rencana kebutuhan tahun anggaran berjalan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	- 2 Buah Lemari Arsip - 50 Buah Kursi Rapat	31,500,000	APBD KAB.	-	15 Buah Kursi Kerja	34,000,000
1 20 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tingkat Ketersediaan kebutuhan rutin peralatan/perlengkapan pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor sesuai rencana kebutuhan selama satu tahun anggaran	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100% (1 Tahun)	20,000,000	APBD KAB.	-	100% (1 Tahun)	20,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan selama satu tahun anggaran	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 Unit Mobil 8 Unit Sepeda Motor	58,700,000	APBD KAB.	-	2 Unit Mobil 8 Unit Sepeda Motor	60,000,000
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	34,840,000	APBD KAB.	-	100%	34,840,000
1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Kecamatan Tanete Riattang Barat	67 Stel	23,450,000	APBD KAB.	-	67 Stel	23,450,000
1	20	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan Tanete Riattang Barat	67 Stel	11,390,000	APBD KAB.	-	67 Stel	11,390,000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	50,000,000	APBD KAB.	-	100%	60,000,000
1	20	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Kursus-Kursus Singkat dan Pelatihan Formal	Kecamatan Tanete Riattang Barat	10 Orang	50,000,000	APBD KAB.	-	12 Orang	60,000,000
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Peningkatan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	44,200,000	APBD KAB.	-	100%	45,500,000
1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersediannya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	14,350,000	APBD KAB.	-	1 Dokumen	15,000,000
1	20	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Tersediannya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	15,500,000	APBD KAB.	-	2 Dokumen	15,500,000
1	20	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersediannya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	14,350,000	APBD KAB.	-	1 Dokumen	15,000,000
1	06	15		Program Pengembangan Data/Informasi	Capaian Ketersediaan Data dan Informasi	Kecamatan Tanete Riattang Barat		15,500,000	APBD KAB.	-		15,500,000
1	06	15	02	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Penyusunan Renja dan Renstra SKPD)	Tersediannya Dokumen Renja dan Renstra SKPD	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	15,500,000	APBD KAB.	-	2 Dokumen	15,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 20 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Capaian Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	3,222,500,000	APBD KAB.	-	100%	3,284,050,000
1 20 30 01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Terlaksananya Rencana Pembinaan Karier PNS	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100 % (1 Tahun)	100,850,000	APBD KAB.	-	100 % (1 Tahun)	101,500,000
1 20 30 02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon PNS	Kecamatan Tanete Riattang Barat	115000 Orang	125,000,000	APBD KAB.	Kalau ada kebijakan pemerintah pusat tentang penerimaan CPNS		
1 20 30 03	Penempatan PNS	Terpenuhinya Penempatan PNS sesuai dengan Kompetensinya	Kecamatan Tanete Riattang Barat	350 Orang	98,400,000	APBD KAB.	-	367 Orang	105,000,000
1 20 30 05	Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SAPK)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Paket	217,000,000		-	1 Paket	218,000,000
1 20 30 08	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi	Terlaksananya Penganugerahan Satyalencana Karya Satya Bagi PNS	Kecamatan Tanete Riattang Barat	250 Orang	39,500,000	APBD KAB.	-	250 Orang	41,350,000
1 20 30 09	Proses Penanganan Kasus-Kasus Disiplin PNS	Tertanganinya Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Kecamatan Tanete Riattang Barat	15 Kasus	102,000,000	APBD KAB.	-	20 Kasus	115,000,000
1 20 30 13.03	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan (Diklat PIM angk. 1)	Jumlah Pejabat Eselon IV yang Mengikuti Diklat PIM IV	Kecamatan Tanete Riattang Barat	30 Orang	650,750,000	APBD KAB.	-	30 Orang	700,000,000
1 20 30 13.04	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan (Diklat PIM angk. 2)	Jumlah Pejabat Eselon IV yang Mengikuti Diklat PIM IV	Kecamatan Tanete Riattang Barat	30 Orang	650,750,000	APBD KAB.	-	30 Orang	700,000,000
1 20 30 15	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	44,550,000	APBD KAB.	-	1 Dokumen	50,000,000
1 20 30 19	Pengelolaan Mutasi Kenaikan Pangkat dan Perpindahan PNS	Jumlah Usul SK Kenaikan Pangkat Reguler dan Pilihan PNS	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1500 SK	143,250,000	APBD KAB.	-	1500 SK	147,000,000
1 20 30 19	Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai	Jumlah Usul SK Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian	Kecamatan Tanete Riattang Barat	300 SK	94,850,000	APBD KAB.	-	300 SK	94,850,000
1 20 30 22	Pelayanan Kesejahteraan Material PNS	Terlaksananya Pelayanan Materil PNS	Kecamatan Tanete Riattang Barat	350 Orang	75,450,000	APBD KAB.	-	350 Orang	77,500,000
1 20 30 23	Pengucapan Sumpah dan Janji PNS	Jumlah PNS yang diangkat Sumpah dan Jannjinya	Kecamatan Tanete Riattang Barat	400 Orang	34,500,000	APBD KAB.	-	500 Orang	40,000,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	30	28	Pembinaan Mental dan Spritual PNS	Terlaksananya Pembinaan Mental dan Spritual PNS	Kabupaten Bone	120 Kali	150,300,000	APBD KAB.	-	130 Kali	162,500,000
1	20	30	28	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Tersedianya Bahan LHKPN untuk di laporkan Ke KPK	Kecamatan Tanete Riattang Barat	120 Wajib LHKPN	45,350,000	APBD KAB.	-	120 Wajib LHKPN	45,350,000
1	20	30	32	Penyelesaian Administrasi Kedudukan Hukum PNS	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Kedudukan Hukum PNS	Kecamatan Tanete Riattang Barat	30 SK	60,000,000	APBD KAB.	-	35 SK	90,500,000
1	20	30	32	Penilaian dan Evaluasi Kinerja PNS	Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja PNS	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	40,500,000	APBD KAB.	-	1 Dokumen	41,000,000
1	20	30	32	Pengelolaan Sistem Absensi PNS	Jumlah PNS yang Dikelola Sistem Absensinya	Kecamatan Tanete Riattang Barat	66 Orang	110,000,000	APBD KAB.	-	66 Orang	110,000,000
1	20	30	33	Analisis Kebutuhan Diklat	Tersedianya Dokumen Kebutuhan Diklat yang di Perlukan Instansi	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	115,500,000	APBD KAB.	-	1 Dokumen	120,500,000
1	20	30	34	Peningkatan Kompetensi Lurah	Meningkatnya Kompetensi Lurah Di Bidang Pemerintahan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	40 Orang	137,000,000	APBD KAB.	-	40 Orang	137,000,000
1	20	30	35	Peningkatan Kompetensi Camat	Meningkatnya Kompetensi Camat Di Bidang Pemerintahan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	40 Orang	137,000,000	APBD KAB.	-	40 Orang	137,000,000
1	20	30	35	Diklat Pelayanan Prima	Tersedianya PNS yang Mampu Melayani sesuai dengan Standar Pelayanan Publik	Kecamatan Tanete Riattang Barat	50 Orang	50,000,000	APBD KAB.	-	50 Orang	50,000,000
1	25	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya data dan Informasi Kepegawalan melalui website	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100% (1 Tahun)	40,000,000	APBD Kabupaten	-	100% (1 Tahun)	40,000,000
1	25	15	02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Tingkat pengelolaan data melalui website bkdd	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100% (1 Tahun)	40,000,000	APBD Kabupaten	-	100% (1 Tahun)	40,000,000
Jumlah Pagu Indikatif								4,235,240,000				4,323,390,000

Watampone, 20 Maret 2017
 KEPALA BAKOSDM KAB. BONE

 Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN
 NIP. 198001020 199603 1 004

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BONE TAHUN 2018**

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BONE

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju, Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20			Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama BKPSDM Kab. Bone selama satu Tahun Anggaran sesuai dengan Perencanaan	Kecamatan Tanete Riattang Barat (BKPSDM Kab. Bone)	100% (1 Tahun)	680,000,000	APBD KAB.	-	100%	695,500,000
1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola selama 12 Bulan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	7500 surat setahun	20,000,000	APBD KAB.	-	8500 surat setahun	23,000,000
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Ketersediaan jasa komunikasi (telepon/fax dan internet) sesuai rencana kebutuhan selama satu tahun anggaran	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100 % (1 Tahun)	13,000,000	APBD KAB.	-	100 % (1 Tahun)	14,650,000
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya tenaga pengelola keuangan antara lain PPTK, satuan PPK, Satuan Bendahara, Pengurus Barang dan Tenaga Sukarela	Kecamatan Tanete Riattang Barat	32 Orang	118,750,000	APBD KAB.	-	32 Orang	120,000,000
1	20	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tingkat ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100 % (1 Tahun)	5,250,000	APBD KAB.	-	100 % (1 Tahun)	7,350,000
1	20	01	13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai Rencana Kebutuhan selama satu tahun anggaran	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100 % (1 Tahun)	3,000,000	APBD KAB.	-	100 % (1 Tahun)	5,000,000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis terbitan surat kabar dan majalah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	15 Media Massa	21,500,000	APBD KAB.	-	15 Media Massa	23,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju, Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 20 01 23	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Tingkat Ketersediaan laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100 % (1 Tahun)	225,000,000	APBD KAB.	-	100 % (1 Tahun)	227,000,000
1 20 01 24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetakan & Penggandaan, serta Makanan & Minuman sesuai Rencana Kebutuhan selama satu tahun anggaran	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100 % (1 Tahun)	273,500,000	APBD KAB.		100 % (1 Tahun)	275,000,000
1 20 2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	187,800,000	APBD KAB.		100%	187,800,000
1 20 2 7	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan AC	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 Unit	10,000,000	APBD KAB.		2 Unit	10.000.000
1 20 2 9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Note Book	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 Unit	15,000,000	APBD KAB.		2 Unit	15,000,000
1 20 2 10	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Sofa dan Pengadaan Kursi Ruangan Pertemuan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Unit Sofa dan 50 Unit Kursi Futura	32,800,000	APBD KAB.		1 Unit Sofa dan 50 Unit Kursi Futura	32,800,000
1 20 2 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Ruangan Kantor	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Unit Ruangan Kantor	50,000,000	APBD KAB.		1 Unit Ruangan Kantor	50,000,000
1 20 2 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Opaerasional	Kendaraan dinas roda 4 (empat) dan kendaraan dinas roda 2 (dua)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 Unit Mobil dan 8 Unit Motor	80,000,000	APBD KAB.		2 unit Mobil dan 8 unit motor	80,000,000
1 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	34,840,000	APBD KAB.	-	100%	34,840,000
1 20 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Kecamatan Tanete Riattang Barat	67 Stel	23,450,000	APBD KAB.	-	67 Stel	23,450,000
1 20 03 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan Tanete Riattang Barat	67 Stel	11,390,000	APBD KAB.	-	67 Stel	11,390,000
1 20 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Peningkatan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	44,200,000	APBD KAB.	-	100%	45,500,000
1 20 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersediannya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	14,350,000	APBD KAB.	-	1 Dokumen	15,000,000
1 20 06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Tersediannya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	15,500,000	APBD KAB.	-	2 Dokumen	15,500,000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	20	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	14,350,000	APBD KAB.	-	1 Dokumen	15,000,000
1	06	15		Program Pengembangan Data/informasi	Capaian Ketersediaan Data dan Informasi	Kecamatan Tanete Riattang Barat		70,000,000	APBD KAB.	-		70,000,000
1	06	15	02	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Penyusunan Renja dan Renstra SKPD)	Tersedianya Dokumen Renja dan Renstra SKPD	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 Dokumen	30,000,000	APBD KAB.	-	2 Dokumen	30,000,000
1	06	15	08	Pengelolaan Tata Naskah Pegawai	Tertatanya dokumen/arsip data kepegawaian	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100% (1 Tahun)	40,000,000	APBD KAB.		100% (1 Tahun)	40,000,000
1	25	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya data dan Informasi Kepegawaian melalui website	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100% (1 Tahun)	62,000,000	APBD Kabupaten	-	100% (1 Tahun)	62,000,000
1	25	15	02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Tingkat pengelolaan data melalui website bkdd	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100% (1 Tahun)	62,000,000	APBD Kabupaten	-	100% (1 Tahun)	62,000,000
1	20	28		Program Kedinasan	Terlaksananya Ujian Dinas Tk. I dan Tk. II dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100% (1 Tahun)	164,250,000	APBD Kabupaten		APBD Kabupaten	164,250,000
1	20	28	02	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah yang PNS mengikuti pendidikan Ujian Dinas Tk. I dan Tk. II dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	Ujian Dinas 50 Orang dan Ujian Penyesuaian Ijazah 100 Orang	100,000,000	APBD Kabupaten		100,000,000	100,000,000
1	20	28	06	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah PNS yang mengikuti PIM Tk. III dan Kursus Singkat dan Pelatihan		PIM Tk. III, 2 Orang dan Kursus Singkat 4 Orang	64,250,000	APBD Kabupaten		PIM Tk. III, 2 Orang dan Kursus Singkat 4 Orang	64,250,000
1	20	29		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	905,000,000	APBD KAB.	-	100%	905,000,000
1	20	29	01	Penyelenggaraan Diklat Prajabatan bagi CPNSD	Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat Prajabatan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	181 CPNSD	905,000,000	APBD KAB.		181 CPNSD	905,000,000
1	20	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Capaian Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100%	3,215,500,000	APBD KAB.	-	100%	3,403,050,000
1	20	30	01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Terlaksananya Rencana Pembinaan Karier PNS	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100 % (1 Tahun)	100,850,000	APBD KAB.	-	100 % (1 Tahun)	101,500,000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	30	02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon PNS	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1500 Pendaftar	125,000,000	APBD KAB.	Kalau ada kebijakan pemerintah pusat tentang penerimaan CPNS		125,000,000
1	20	30	08	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi	Terlaksananya Penganugrahan Satyalencana Karya Satya Bagi PNS	Kecamatan Tanete Riattang Barat	250 Orang	39,500,000	APBD KAB.	-	250 Orang	41,350,000
1	20	30	09	Proses Penanganan Kasus-Kasus Disiplin PNS	Tertanganinya Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Kecamatan Tanete Riattang Barat	15 Kasus	102,000,000	APBD KAB.	-	20 Kasus	115,000,000
1	20	30	11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Terlaksananya Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 Orang PNS	40,000,000	APBD KAB.		2 Orang PNS	40,000,000
1	20	30	13.03	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan (Diklat PIM angk. 1)	Jumlah Pejabat Eselon IV yang Mengikuti Diklat PIM IV	Kecamatan Tanete Riattang Barat	30 Orang	650,750,000	APBD KAB.	-	30 Orang	700,000,000
1	20	30	13.04	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan (Diklat PIM angk. 2)	Jumlah Pejabat Eselon IV yang Mengikuti Diklat PIM IV	Kecamatan Tanete Riattang Barat	30 Orang	650,750,000	APBD KAB.	-	30 Orang	700,000,000
1	20	30	15	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	44,550,000	APBD KAB.	-	1 Dokumen	50,000,000
1	20	30	18	Pengelolaan Mutasi Kenaikan Pangkat dan Perpindahan PNS	Jumlah Usul SK Kenaikan Pangkat Reguler dan Pilihan PNS	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1500 SK	143,250,000	APBD KAB.	-	1500 SK	147,000,000
1	20	30	19	Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai	Jumlah Usul SK Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian	Kecamatan Tanete Riattang Barat	300 SK	94,850,000	APBD KAB.	-	300 SK	94,850,000
1	20	30	21	Penempatan PNS	Terpenuhinya Penempatan PNS sesuai dengan Kompetensinya	Kecamatan Tanete Riattang Barat	350 Orang	98,400,000	APBD KAB.	-	367 Orang	105,000,000
1	20	30	22	Pelayanan Kesejahteraan Material PNS	Terlaksananya Pelayanan Materil PNS	Kecamatan Tanete Riattang Barat	350 Orang	75,450,000	APBD KAB.	-	350 Orang	77,500,000
1	20	30	23	Pengucapan Sumpah dan Janji PNS	Jumlah PNS yang diangkat Sumpah dan Jannjinya	Kecamatan Tanete Riattang Barat	400 Orang	34,500,000	APBD KAB.	-	500 Orang	40,000,000
1	20	30	28	Pembinaan Mental dan Spritual PNS	Terlaksananya Pembinaan Mental dan Spritual PNS	Kabupaten Bone	120 Kali	150,300,000	APBD KAB.	-	130 Kali	162,500,000
1	20	30	29	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Tersedianya Bahan LHKPN untuk di laporkan Ke KPK	Kecamatan Tanete Riattang Barat	120 Wajib LHKPN	45,350,000	APBD KAB.	-	120 Wajib LHKPN	45,350,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 20 30 32	Penyelesaian Administrasi Kedudukan Hukum PNS	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Kedudukan Hukum PNS	Kecamatan Tanete Riattang Barat	30 SK	60,000,000	APBD KAB.	-	35 SK	90,500,000
1 20 30 33	Penilaian dan Evaluasi Kinerja PNS	Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja PNS	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	40,500,000	APBD KAB.	-	1 Dokumen	41,000,000
1 20 30 34	Pengelolaan Sistem Absensi PNS	Terlaksananya Pengelola Sistem Absensi	Kecamatan Tanete Riattang Barat	Semua OPD	50,000,000	APBD KAB.	-	Semua OPD	50,000,000
1 20 30 35	Penyusunan Daftar Urut Kepegawaian	Jumlah Dokumen DUK PNS	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Dokumen DUK	40,000,000	APBD KAB.	-	1 Dokumen DUK	41,000,000
1 20 30 36	Pengelolaan Izin Belajar dan Izin Belajar	Jumlah usul Izin Belajar dan Tugas Belajar yang memnuhi syarat untuk diproses	Kecamatan Tanete Riattang Barat	150 Usulan	40,000,000	APBD KAB.	-	1 Dokumen	41,000,000
1 20 30 37	Pelepasan PNS yang memasuki masa purnatugas	Jumlah PNS yang akan dilepas karena memasuki masa purna Tugas	Kecamatan Tanete Riattang Barat	350 PNS Purna Tugas	150,000,000	APBD KAB.	-	350 PNS Purna Tugas	150,000,000
1 20 30 38	Analisis Kebutuhan Diklat	Tersedianya Dokumen Kebutuhan Diklat yang di Perlukan Instansi	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1 Dokumen	115,500,000	APBD KAB.	-	1 Dokumen	120,500,000
1 20 30 39	Peningkatan Kompetensi Lurah	Meningkatnya Kompetensi Lurah Di Bidang Pemerintahan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	44 Orang	137,000,000	APBD KAB.	-	44 Orang	137,000,000
1 20 30 40	Peningkatan Kompetensi Camat	Meningkatnya Kompetensi Camat Di Bidang Pemerintahan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	27 Orang	137,000,000	APBD KAB.	-	27 Orang	137,000,000
1 20 30 41	Diklat Pelayanan Prima	Tersedianya PNS yang Mampu Melayani sesuai dengan Standar Pelayanan Publik	Kecamatan Tanete Riattang Barat	50 Orang	50,000,000	APBD KAB.	-	50 Orang	50,000,000
Jumlah Pagu Indikatif					5,363,590,000				5,403,690,000

Watampone, 1 Agustus 2017

KEPALA BKPSDM KAB. BONE

Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN
NIP. 19701020 199603 1 004

1902.

(1902)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN JEND. A. YANI NO. TELEPON
WATAMPONE

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI	: Iep BPSOM	DITERIMA	16-10-2017
TGL. SURAT	: 12-10-2017	TANGGAL:	
NOMOR SURAT	: 560/1214/X/2017	NOMOR	
		AGENDA :	-
		DITERUSKAN KEPADA :	-
ISI DISPOSISI	1. ✓ Yts. Bayan Bayan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Yts. Bayan Bayan Yts. Bayan Bayan Yts. Bayan Bayan		

Yts. Bayan Bayan
12/10/17

PARAF :
TANGGAL :

16/10/17

INDEKS Program Kegiatan No. Unit 3546 Kode : 560		Tanggal 10/10/2017 No. Surat 560/10/10/2017		Dari : Kepada :		Tanggal 10/10/2017 No. Surat 560/10/10/2017		Pengolah : Paraf :		Catatan :		unjuk Silang :	
Lampiran													
Dikembangkan Program Kegiatan tahun 2018													

PEMERINTAH KABUPATEN BONE .
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN JEND. A. YANINO. TELEPON
WATAMPONE

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI :	DI TERIMA
	TANGGAL :
TGL. SURAT :	NOMOR
	AGENDA :
NOMOR SURAT :	DITERUSKAN KEPADA :
ISI DISPOSISI :	1. K. - BPKMD -
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

PARAF :
TANGGAL :



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. JEND. AHMAD YANI No. 3 WATAMPONE KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kode Pos 92733 Telepon : 0481-26096 Fax : 0481-26096

Watampone, 12 Oktober 2017

Kepada

Nomor : 560/ 1214 /X/2017
Lampiran : 1 (Satu) Example
Perihal : Penambahan Program Kegiatan
Tahun 2018

Yth : Bapak Bupati Bone
Cq. Kepala Bappeda Kab.Bone
Di-
Watampone

Dalam rangka konsistensi dan sinergitas perencanaan dan penganggaran Daerah Tahun 2018, maka seluruh Program/Kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bone tahun 2018 harus menjadi rujukan dalam penyusunan RKA tahun Anggaran 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kepada Bapak Bupati agar memberikan rekomendasi terkait penambahan program/kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Kabupaten Bone, sebagaimana terlampir.

Demikian atas perkenaanannya diucapkan banyak terima kasih.



KEPALA BKPSDM KAB. BONE

Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19701020 199603 1004

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kab. Bone
2. Kepala BPKAD Kab.Bone
3. Peringgal.

Lampiran

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	INDIKATOR
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp 3.121.000	
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 120.000.000	
	Pengembangan dan Pengembangan Aparatur	- Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Rp 342.100.000	
		- Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Rp 215.100.000	